



**Rapat Dengar Pendapat**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2016**  
**DENGAN KOMISI XI DPR RI**

**Jakarta, 24 Agustus 2015**

# MATERI TAYANGAN

- 1 KONDISI DAN ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
- 2 PENCAPAIAN KINERJA S/D AGUSTUS-2015
- 3 RINGKASAN JAWABAN FOCUS GROUP DISCUSSION DENGAN KOMISI XI DPR
- 4 REALISASI , RENCANA ANGGARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN OJK 2016
- 5 FOKUS RENCANA KERJA & ANGGARAN 2016
- 6 ISU STRATEGIS TERKAIT RKA DAN KESIMPULAN

# 1

## **KONDISI DAN ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

# Asesmen Sektor Jasa Keuangan

- Situasi pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir ini cukup bergejolak sebagai akibat dari PBOC mendevaluasi mata uangnya (Yuan) dan ketidakpastian terkait rencana kenaikan Fed Fun Rate maupun kelanjutan bailout yunani.
- Kebijakan terakhir PBOC ini menimbulkan sentimen negatif luar biasa, kita melihat arus dana keluar dari emerging market, tentunya indonesia juga terkena imbasnya. IHSG mengalami pelemahan signifikan dan ditutup pada level 4.336, turun 17,05% secara year to date.

Dalam rapat FKSSK pada pertengahan agustus ini dapat kami sampaikan bahwa stabilitas jasa keuangan masih terjaga dengan baik. Indikator *surveillance* masih terkendali.

- Daya tahan industri perbankan yang mendominasi sektor jasa keuangan kita relatif kuat dengan CAR sebesar 20,28% pada akhir Juni 2015 yang sebagian besar dalam bentuk modal inti. Selain itu likuiditas perbankan juga dalam keadaan baik dengan Rasio AL/NCD sebesar 80,94% pada posisi akhir Juli 2015.
- Industri asuransi memiliki tingkat kecukupan permodalan yang kuat. Posisi Juni 2015 *Risk Based Capital* Asuransi Jiwa tercatat sebesar 494% dan Asuransi Umum sebesar 237%, jauh di atas batas minimum 120%.

## Asesmen Sektor Jasa Keuangan (Lanjutan) *supervisory action* dalam menyikapi kondisi ekonomi yang sangat dinamis

- Melakukan *stress test* secara periodik dan selanjutnya menetapkan langkah-langkah yang harus diambil apabila dari hasil *stress test* tersebut. Bagi bank dengan tingkat kecukupan modal bank menjadi lebih rendah dari CAR profil risiko, kami telah meminta bank tersebut untuk memperkuat permodalannya. Meskipun terdapat beberapa bank yang memiliki CAR lebih rendah dari CAR profil risiko, tingkat permodalan masih kuat untuk menahan kenaikan risiko kredit dan pasar.
- Melakukan pemantauan secara dekat terhadap indikasi kenaikan risiko kredit Bank dan juga memantau kinerja debitur-debitur besar yang terekspose risiko akibat pelemahan Rupiah. Sekarang ini tingkat risiko kredit perbankan masih di level aman. Rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) secara *nett* tercatat sebesar 1,25% persen dan NPL *gross* sebesar 2,55%.
- Menempatkan *market risk specialist* ke beberapa bank yang memiliki volume transaksi valas tinggi untuk memastikan tidak ada bank yang mengambil keuntungan dari kondisi ini.
- Meningkatkan koordinasi dengan anggota FKSSK untuk mengeluarkan bauran kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diimplementasikan secara tepat waktu dan takaran yang didukung komunikasi publik yang baik.

**2**

# **PENCAPAIAN KINERJA S/D AGUSTUS-2015**

## Fungsi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

- OJK telah mengeluarkan 35 paket kebijakan sektor jasa keuangan
- OJK telah menerbitkan 10 POJK dan 21 SEOJK

## Fungsi Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

- Penerapan Program Laku Pandai
- Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR
- Pengembangan pengawasan terintegrasi melalui sosialisasi /workshop terhadap pengawas serta pengembangan infrastruktur sistem informasi yang mendukung Pengawasan Terintegrasi
- Pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*)
- Pelaksanaan Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah
- Pengembangan Infrastruktur Dalam Rangka Pendalaman Pasar Modal
- Pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*Fundnet*)
- Perluasan jenis layanan Perusahaan Efek berupa *one day trade* dan *one stop services*
- Penyederhanaan proses dan prosedur penawaran umum
- Peningkatan pengawasan dan pengaturan untuk *regulated market* dan *Over The Counter (OTC)* Obligasi
- Pengembangan papan perdagangan untuk UKM
- Penyempurnaan ketentuan penerbitan Obligasi Daerah.
- Optimalisasi kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri
- Revitalisasi modal ventura
- Pengembangan asuransi mikro
- Penyesuaian Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan
- Penyiapan *Framework* dan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
- Implementasi pengawasan berbasis risiko IKNB

## Fungsi Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

- Penyelenggaraan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS)
- Penyelenggaraan *Expo iB Vaganza* bersama bank syariah di Solo, Mataram dan Makassar
- Kegiatan *Training of Trainers* (TOT) kepada akademisi serta meluncurkan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019
- Peluncuran *Road Map* Pasar Modal Syariah
- Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah
- Peningkatan *supply* dan *demand* produk pasar modal syariah
- Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah
- Penelitian mengenai besaran uang muka bagi perusahaan pembiayaan syariah.
- Penyelenggaraan sosialisasi dan *pilot project* pemasaran asuransi mikro di 15 kota
- Pelaksanaan Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan UKM di tiga wilayah

## Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Pemberian 16.267 Layanan Konsumen selama periode 1 Januari 2015 s.d. 14 Agustus 2015 berupa 645 pengaduan, 11.459 permintaan informasi / pertanyaan dan 4.163 laporan/penyampaian informasi. Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai lebih dari 78%.
- Peluncuran sistem *traceable* dan *trackable* dan tagline layanan SIGAP ( Santun, Informatif, Tanggap dan Profesional) pada Layanan Konsumen OJK.
- Pembentukan 7 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) serta dukungan penyiapan operasionalisasi LAPS melalui asistensi, penilaian dan pengembangan kompetensi teknis
- Peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam penanganan pengaduan
- Pelaksanaan Thematic Surveillance.
- Seminar Nasional Perlindungan Konsumen.
- Penerimaan pengaduan dan penyediaan informasi/edukasi keuangan di 34 Kantor OJK di daerah dengan tersedianya SDM khusus yang menangani edukasi dan perlindungan konsumen.



## Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (Lanjutan)

- Pelaksanaan 53 program edukasi keuangan berupa antara lain, di 30 kota (termasuk 2 kota di Luar Negeri – Taiwan dan Tokyo) dengan total peserta lebih dari 17,000 orang
- Peluncuran buku edukasi keuangan untuk siswa SMP yang berjudul “OJK dan Industri Jasa Keuangan”.
- Peluncuran dan pengiriman Mobil Literasi Keuangan (Simolek) tahap II untuk 20 KOJK di daerah.
- Kerjasama dengan beberapa Pemkab/Pemkot dlm program pemberdayaan masyarakat dengan program “Yuk Sikapi”.
- Peluncuran Tabungan Siswa Syariah yang disebut Simpanan Pelajar (SIMPEL) Syariah.
- Pelaksanaan uji coba dan ToT Layanan Keuangan Mikro.
- Penyelenggaraan Seminar Internasional Literasi Keuangan ketiga dengan tema “Financial Literacy to Support Financial Inclusion”.
- Diseminasi 4 kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen berupa peningkatan budaya menabung, edukasi dan akses keuangan utk UMKM, pemberdayaan konsumen dan upaya preventif tawaran investasi tanpa izin.

## Penguatan Kapasitas Organisasi

- Peluncuran *Whistle Blowing System* (WBS) dan Manajemen Anti-Gratifikasi
- Penyediaan Gedung Kantor OJK di daerah (11 kantor) melalui sewa
- Mengembangkan OJK *Institute* serta melakukan *workshop* Pengawasan Bank Terintegrasi dan Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko bagi Pengawas Bank Umum yang sekaligus untuk mendukung program *recycle* OJK.

## Langkah preventif untuk menghindari investasi ilegal

- Iklan layanan masyarakat mengenai kehati-hatian dalam berinvestasi dan bekerjasama dengan PUJK untuk memasang materi edukasi tersebut
- Menyampaikan materi edukasi keuangan mengenai berinvestasi secara bijak
- Berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi mengenai informasi/laporan dari masyarakat terkait kegiatan penawaran investasi ilegal
- Menyampaikan informasi kepada Kementerian Komunikasi dan informatika untuk memblokir 20 situs terkait dengan tawaran investasi ilegal.
- Berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menginformasikan adanya tawaran investasi illegal melalui media yang dapat diakses publik.
- Melakukan media visit dalam rangka edukasi dan pemberian himbauan ke 5 media massa (cetak dan elektronik) yang telah memasang iklan tawaran investasi ilegal.

# 3

## **REALISASI , RENCANA ANGGARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN OJK 2016**

# PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RKA TAHUN 2016

Dalam menyusun RKA Tahun 2016, OJK mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

## A. Kenaikan Proyeksi Pungutan

- 1) Kenaikan aset sebesar 13%;
- 2) Kenaikan pendapatan usaha dan biaya emisi sebesar 6%; dan
- 3) Penyisihan piutang yang bermasalah sebesar 2,7%.

## B. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyesuaian Tunjangan Kemahalan (*Cost of Living Adjustment/CoLA*) sebesar  $\pm 5,5\%$  dengan memperhatikan proyeksi tingkat inflasi; Penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja (*merit increase*) kisaran 2% - 5% sesuai level kinerja pegawai.
- 2) Remunerasi pegawai penugasan dari BI tetap dibayarkan Bank Indonesia, penyetaraan remunerasi dibayarkan oleh OJK; dan
- 3) Penambahan jumlah pegawai OJK sebanyak 550 pegawai pada tahun 2016 (serta sarana pendukung kelogistikan dan IT).

## C. Kegiatan Operasional

- 1) Melanjutkan sewa gedung kantor dan rumah jabatan serta penataan dan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas serta pengadaan kendaraan dinas;
- 2) Pembelian aset berupa tanah/gedung kantor/rumah jabatan; dan
- 3) Melanjutkan implementasi rancang bangun IT serta pemeliharaan dan pengembangan IT.

# PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RKA TAHUN 2016 (LANJUTAN)

## D. Penguatan Organisasi

- 1) Pengembangan organisasi/re-organisasi OJK di Kantor Pusat dan penambahan tugas dan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan di KR dan KOJK; dan
- 2) Program Pengembangan Pegawai (*On Boarding Program, Leadership Development, Soft & Hard Competency Development* serta *Assessment Center* SDM OJK).

# RENCANA KERJA & ANGGARAN OJK TAHUN 2016 (RINCIAN PER KEGIATAN)

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, total kebutuhan anggaran OJK tahun 2016 adalah sebesar Rp3.802,80 miliar atau meningkat sebesar 6,18% dibanding tahun 2015, dengan sumber pembiayaan sebagai berikut :

(dalam miliar rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	2015	2016	% Perubahan
1.	Kegiatan Operasional	630,05	698,99	10,94
2.	Kegiatan Administratif	2.346,50	2.700,94	15,11
3.	Kegiatan Pengadaan Aset	570,55	370,23	-35,11
4.	Kegiatan Pendukung Lainnya	34,53	32,64	-5,48
	Jumlah	3.581,63	3.802,80	6,18

Penurunan pengadaan aset sebesar 35,11% dikarenakan tahun 2016, penyediaan gedung kantor di daerah dan rumah jabatan masih menggunakan opsi sewa yang masuk dalam kegiatan administratif dan mengakibatkan pengeluaran kegiatan administratif meningkat.

# Rencana Kerja & Anggaran OJK Tahun 2016 (Rincian Per Kegiatan) - Lanjutan

(dalam miliar rupiah)

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2015	PAGU ANGGARAN 2016	% PERUBAHAN (2015-2016)
<b>I</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>632.750.957</b>	<b>698.989.543</b>	<b>10,47%</b>
	A Bidang Perbankan	217.693.203	220.635.994	1,35%
	B Bidang Pasar Modal	50.091.573	48.859.322	-2,46%
	C Bidang Industri Keuangan Non Bank	51.290.399	64.962.118	26,66% 1)
	D Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen	63.568.998	64.657.406	1,71%
	E Bidang AIMRPK	8.101.323	9.280.803	14,56%
	F Bidang Manajemen Strategis	242.005.461	290.593.900	20,08% 2)
<b>II</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRATIF</b>	<b>2.344.766.993</b>	<b>2.700.940.798</b>	<b>15,19%</b>
	A Perkantoran	358.282.700	547.048.192	52,69% 3)
	B Remunerasi	1.846.730.041	2.022.787.088	9,53%
	C Pendidikan dan Pelatihan	91.846.402	82.420.470	-10,26%
	D Pengembangan Organisasi dan SDM	47.907.850	48.685.048	1,62%
<b>III</b>	<b>KEGIATAN PENGADAAN ASET</b>	<b>570.554.230</b>	<b>370.234.377</b>	<b>-35,11%</b>
	A Persediaan	35.839.138	38.758.054	8,14%
	B Gedung dan Peralatan	274.763.092	77.352.873	-71,85%
	C Kendaraan Dinas	24.006.120	9.456.120	-60,61%
	D Infrastruktur Teknologi Informasi	235.945.880	244.667.330	3,70%
<b>IV</b>	<b>KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA</b>	<b>33.555.131</b>	<b>32.635.283</b>	<b>-2,74%</b>
	A Pelayanan/Pengamanan/Representasi	23.881.986	20.000.000	-16,25%
	B Kekaryawanan, Kelembagaan, dan Sosial	9.673.145	12.635.283	30,62% 4)
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>3.581.627.311</b>	<b>3.802.800.000</b>	<b>6,18%</b>

## KETERANGAN :

- 1) Kenaikan Bidang IKNB, antara lain karena re-organisasi, penambahan program kerja baru dan peningkatan frekuensi
- 2) Kenaikan Bidang MS, antara lain karena penambahan program kerja baru dan perubahan organisasi di lingkungan MS;
- 3) Kenaikan biaya perkantoran, antara lain karena penambahan biaya sewa lanjutan, sewa baru dan penataan gedung kantor;
- 4) Kenaikan biaya kekaryawanan, antara lain karena peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2016.

# RENCANA KERJA & ANGGARAN OJK TAHUN 2016 (RINCIAN PER BIDANG)

(dalam miliar rupiah)

No.	Bidang	2015	2016	% Perubahan
1.	Perbankan	327,60	348,78	6,47
2.	Pasar Modal	45,55	51,70	13,5
3.	Industri Keuangan Non Bank	55,65	65,24	17,23
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	63,30	64,80	2,37
5.	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	8,23	9,42	14,46
6.	Manajemen Strategis	3.081,30	3.262,86	5,89
	Jumlah	3.581,63	3.802,80	6,18



**4**

# **FOKUS RENCANA KERJA & ANGGARAN 2016**

# RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2016

## Fokus Kegiatan Utama

### Sistem Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja OJK

- Sistem manajemen anggaran dan kinerja OJK berbasis balanced scorecard sehingga siklus anggaran dihubungkan dengan pengelolaan strategi dan kinerja
- Perencanaan dan evaluasi anggaran mengacu kepada sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi fokus utama program kerja dan anggaran 2016
- Sasaran strategis memiliki indikator pengukuran kinerja

### CASCADING & ALIGNMENT DENGAN PROGAM KERJA

- Seluruh satuan kerja menjabarkan fokus utama kedalam program kerja, kegiatan dan inisiatif strategis
- Satker melakukan kontrak kinerja menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

# RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2016

## Fokus Kegiatan Utama

**1. Penguatan  
Pengawasan SJK**

**2. Layanan  
Perizinan Prima**

**3. Pendalaman  
Pasar**

**4. Peningkatan  
Akses Keuangan**

**5. Pengembangan  
SJK Syariah**

**6. Penguatan  
Ekonomi  
Kerakyatan /  
Sektor Produktif**

**7. Daya Saing  
Menghadapi MEA**

**8. Program  
*Recycling***

**9. Peningkatan  
Perlindungan  
Konsumen**

**10. Penguatan  
Kapasitas dan  
*Governance* OJK**

FOKUS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KERJA UTAMA	ANGGARAN
<p>1. Penguatan Pengawasan SJK</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK)</li> <li>2. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan <i>Stakeholders</i> Terhadap Kinerja OJK</li> <li>3. Pelaksanaan Pengawasan SJK yang Terintegrasi</li> <li>4. Tk. Kualitas Pelaksanaan <i>Surveillance</i> OJK Untuk Mendukung FKSSK</li> <li>5. % Realisasi Program Pengembangan Aplikasi &amp; Infrastruktur SI</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Aplikasi Pengawasan Terintegrasi</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Perbankan</li> <li>- Penyusunan/penyempurnaan ketentuan Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB</li> <li>- Pemeriksaan/pengawasan terhadap IJK</li> </ul>	<p>Rp1,50 T</p>
<p>2. Layanan Perizinan Prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan <i>Stakeholders</i> Terhadap Kinerja OJK</li> <li>2. Penerapan Perizinan Prima</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan/atau Kajian terkait dengan Kebijakan Perbankan</li> <li>- Sosialisasi pengembangan aplikasi perizinan <i>on-line</i> Perbankan, Pasar Modal dan IKNB</li> <li>- Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan perizinan LKM</li> </ul>	<p>Rp0,19 T</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KERJA UTAMA	ANGGARAN
<p><b>3.</b> Pendalaman Pasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kedalaman Pasar Keuangan</li> <li>2. % Kenaikan Indeks Inklusifitas Produk/Jasa Keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Iklan Perbankan, Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan</li> <li>- Penelitian dan/atau Kajian terkait dengan Kebijakan Perbankan</li> <li>- Pertemuan/Koordinasi Tahunan dengan Industri Jasa Keuangan</li> </ul>	<p><b>Rp0,08 T</b></p>
<p><b>4.</b> Peningkatan Akses Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kedalaman Pasar Keuangan</li> <li>2. % Kenaikan Indeks Inklusifitas Produk/Jasa Keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan media informasi dalam rangka inklusi keuangan</li> <li>- Kegiatan Edukasi UMKM di Wilayah Kerja, Pelajar, Ibu RT dan Pensiunan</li> <li>- Penyusunan Kurikulum Formal di tingkat pelajar</li> </ul>	<p><b>Rp0,11 T</b></p>

# RENCANA KERJA & ANGGARAN 2016 (Lanjutan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KERJA UTAMA	ANGGARAN
<p>5. Pengembangan SJK Syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kinerja SJK Syariah</li> <li>2. Tk. Pelaksanaan Kegiatan <i>Outreach</i> SJK Syariah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun standar produk dan jasa perbankan syariah</li> <li>- Melakukan riset dan memberikan rekomendasi mengenai kelembagaan bank syariah</li> <li>- Kajian pengembangan ketentuan pengawasan IJK Syariah</li> <li>- Pelaksanaan Seminar Internasional Syariah</li> </ul>	<p>Rp0,09 T</p>
<p>6. Penguatan Ekonomi Kerakyatan / Sektor Produktif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kinerja SJK</li> <li>2. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan <i>Stakeholders</i> Terhadap Kinerja OJK</li> <li>3. Ketahanan &amp; Daya Saing SJK Menghadapi MEA</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festival Pasar Syariah</li> <li>- Edukasi/ sosialisasi ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM kepada berbagai pihak</li> <li>- Penyelenggaraan pengembangan asuransi mikro</li> <li>- Penyelenggaraan Pengembangan Asuransi Mikro</li> <li>- Penelitian terhadap efektivitas kebijakan BPR dan UMKM</li> </ul>	<p>Rp0,04 T</p>

# RENCANA KERJA & ANGGARAN 2016 (Lanjutan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KERJA UTAMA	ANGGARAN
7. Daya Saing Menghadapi MEA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kinerja SJK</li> <li>2. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan <i>Stakeholders</i> Terhadap Kinerja OJK</li> <li>3. Ketentuan SJK yang diselaraskan Ketahanan &amp; Daya Saing SJK Menghadapi MEA</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Working Group Pengembangan Produk dan Pasar</li> <li>- Review Standar Internasional</li> <li>- Merumuskan posisi dan berpartisipasi dalam forum internasional</li> <li>- Koordinasi dengan Otoritas Pengawas SJK di Negara Lain</li> <li>- Perencanaan dan Peningkatan Kerjasama Internasional</li> </ul>	Rp0,08 T
8. Program Recycling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan <i>Stakeholders</i> Terhadap Kinerja OJK</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan <i>capacity building</i> dan sertifikasi pelaku IJK</li> <li>- Survei indeks kepuasan <i>stakeholder</i></li> <li>- Pasar Keuangan Rakyat</li> </ul>	Rp0,32 T
9. Peningkatan Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % Pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK</li> <li>2. % Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan penyelesaian sengketa konsumen</li> <li>- Penyempurnaan ketentuan perlindungan konsumen</li> <li>- Kerjasama dengan satuan kerja dan dengan penegak hukum dan pihak lain</li> <li>- Pengawasan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa</li> </ul>	Rp0,14 T

# RENCANA KERJA & ANGGARAN 2016 (Lanjutan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KERJA UTAMA	ANGGARAN
<p>10. Penguatan Kapasitas dan Governance OJK</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan <i>Stakeholders</i> Terhadap Kinerja OJK</li> <li>2. Tingkat Implementasi <i>Good Governance</i> OJK</li> <li>3. Predikat Laporan Keuangan Tahunan OJK</li> <li>4. % Pembiayaan OJK yang Bersumber dari Penerimaan Pungutan</li> <li>5. % Penyelesaian Implementasi Program Penataan Organisasi</li> <li>6. Tingkat Pemenuhan SDM secara Kualitas dan Kuantitas</li> <li>7. Indeks Internalisasi Nilai Strategis OJK</li> <li>8. % Realisasi Program Pengembangan Aplikasi &amp; Infrastruktur SI</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Inisiatif Penataan Organisasi OJK</li> <li>- Kerjasama dengan pihak eksternal dan internal dalam rangka mendukung tugas yang bersifat manajemen strategis</li> <li>- Pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i>, Program <i>Anti Fraud</i> dan Gratifikasi untuk meningkatkan integritas</li> </ul>	<p>Rp1,25 T</p>



**5**

# **ISU STRATEGIS TERKAIT RKA**

# ISU STRATEGIS TERKAIT RKA

## 1. Penyediaan Sarana Gedung Kantor Pusat OJK

- Penyediaan kantor OJK Pusat secara mandiri saat ini masih dalam proses. Untuk saat ini Kantor OJK Pusat masih menggunakan gedung kantor yang tersebar di tiga lokasi, yaitu:
  - Gedung eks Bapepam-LK yang dipinjamkan oleh Kementerian Keuangan;
  - Gedung yang dipinjamkan Bank Indonesia; dan
  - Gedung Merdeka yang disewa.

Hal ini menyebabkan koordinasi kerja dan upaya membangun budaya organisasi menjadi sulit.

- Direncanakan pada tahun 2016, OJK akan menyewa Gedung Baru yang dapat menampung pegawai OJK dengan alasan sebagai berikut:
  - Total luas ruang kerja tersedia di kantor pusat OJK saat ini hanya seluas 55.028 m<sup>2</sup> dan saat ini masih tersebar di 3 (tiga) gedung yang terpisah.
  - Formasi efektif pegawai OJK di kantor pusat sampai dengan akhir 2015 sebesar 4.451 pegawai sehingga dibutuhkan luas ruang kerja yang memadai (minimal 76.888 m<sup>2</sup>).
- Kebutuhan anggaran sewa gedung baru per tahun diperkirakan sebesar Rp 420,18 miliar, yang sudah dianggarkan pada tahun 2016 sebesar Rp 27,6 miliar sehingga kekurangan dana yang belum dianggarkan tahun 2016 adalah sebesar Rp 392,58 miliar.

## ISU STRATEGIS TERKAIT RKA (LANJUTAN)

### 2. Penyediaan Sarana Gedung Kantor Daerah OJK

Kantor OJK daerah sampai dengan semester I-2015, baru menempati 6 kantor sewa (5 kantor lagi dalam proses penataan dan akan segera ditempati), sedangkan 23 kantor lainnya masih menggunakan gedung Bank Indonesia.

### 3. OJK menyampaikan kepada Komisi XI DPR-RI untuk dapat menggunakan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan Tahun 2014 sebesar Rp183,96 M untuk infrastruktur gedung kantor pusat dan daerah serta sarana pendukung operasional OJK pada tahun anggaran 2015 ([Lampiran I](#)).

### 4. OJK sebagai Subjek Pajak Badan

Pada saat ini OJK dan Kementerian Keuangan masih membahas kemungkinan agar OJK mendapat penangguhan sebagai wajib pajak badan sampai dengan OJK dapat membiayai operasionalnya secara mandiri dengan pembiayaan bersumber dari Pungutan kepada sektor jasa keuangan dan tidak lagi menggunakan dana APBN.

### 5. Amandemen Undang-Undang OJK terkait pembentukan “Dana Cadangan” dalam rangka menjaga sustainability keuangan OJK.

**6**

**RINGKASAN JAWABAN FOCUS GROUP  
DISCUSSION DENGAN KOMISI XI DPR RI  
22 AGUSTUS 2015**

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015

## Terkait Pungutan kepada Industri Jasa Keuangan

### Aspek legalitas pungutan

- Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengenai tata cara penetapan, jenis, besaran, waktu penagihan
- PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan
- Dasar hukum di atas juga diperkuat dengan keputusan MK tanggal 4 Agustus 2015 yang menolak gugatan pemohon khususnya yang berkaitan dengan pungutan
- Penggunaan pungutan akan diaudit pihak internal OJK dan pihak eksternal yaitu BPK atau KAP yang ditunjuk BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (8). Secara periodik dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas publik, OJK wajib menyampaikan Laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada Pemerintah (Presiden) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

### Penerimaan pungutan per sektor

No	Sektor	2014	2015 (Per 15 Juli)
1	Perbankan	1.335,5	1.481,89
2	Pasar Modal	397,9	285,55
3	IKNB	283,0	315,03
4	Pengelolaan	4,0	5,63
	Jumlah	2.020,3	2.088,10

# Jawaban Pertanyaan Terkait Pungutan OJK (Kenaikan Penerimaan Pungutan)

## Tarif Pungutan :

- a. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek : 15% dari pendapatan usaha.
- b. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya: 0,045% (minimal Rp10 juta) dari aset.
- c. Manajer Investasi: 0,045% (minimal Rp10 juta) dari dana kelolaan.
- d. Penasihat Investasi: 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan imbalan jasa nasihat investasi.

Terjadinya kenaikan penerimaan yang signifikan disebabkan karena pungutan diterapkan secara bertahap. Tahun 2013 dan 2014, anggaran OJK sepenuhnya bersumber pada APBN. Tahun 2015, anggaran OJK 48,73% berasal dari APBN dan 51,27% berasal dari pungutan. Tahun 2016 anggaran OJK sepenuhnya berasal dari pungutan.

Kenaikan signifikan target pungutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Di tahun 2014, Tarif pungutan adalah sebesar  $\frac{2}{3}$  dari tarif normal (0,045% dari aset dan 1,2% dari pendapatan usaha) sehingga pungutan yang dikenakan yaitu  $\frac{2}{3} \times 0,045\% = 0,030\%$  dari aset dan 0,8% dari pendapatan usaha.
- b. Terjadi kenaikan nilai dasar pengenaan dengan asumsi pertumbuhan aset rata-rata sebesar 13%, kenaikan pendapatan usaha rata-rata sebesar 6% (berdasarkan data historis).
- c. Adanya tagihan selisih perhitungan kembali kewajiban pungutan biaya tahunan tahun 2014 yang dihitung berdasarkan dasar pengenaan tahun yang bersangkutan.

Penerapan huruf a dan c merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2014, sedangkan huruf b didasarkan adanya pertumbuhan aset dan pendapatan usaha di sektor jasa keuangan pada tahun 2015.

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015

## Terkait Penyerapan Anggaran dan prognosisnya

### Penyerapan anggaran

Sampai dengan semester I-2015, penyerapan anggaran OJK masih kecil disebabkan oleh:

1. Belum terlaksananya program kerja Satker
2. Pembayaran baru akan jatuh tempo di triwulan III atau triwulan IV

Mengingat penyerapan realisasi anggaran OJK yang masih rendah sementara periode efektif penyerapan anggaran tinggal 4 bulan, langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk memacu penyerapan realisasi anggaran antara lain:

1. Mempercepat pelaksanaan program kerja strategis Satuan Kerja
2. Mempercepat pelaksanaan pembayaran jatuh tempo
3. Realokasi anggaran dan monitoring pengadaan infrastuktur yang bernilai besar (TI/SI, Logistik)

### Progonosis penyerapan anggaran

Prognosa sampai akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp3.547,0 miliar atau sebesar 99,04%.

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015

## Terkait kinerja OJK dalam pengembangan LKM

### PERKEMBANGAN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI)

Bank Penyelenggara Laku Pandai	BRI	Mandiri	BTPN	BCA	BTN	BNI
<b>Produk Tabungan</b>	Tabunganku	Tabunganmu	Tabungan WOW BSA	Tabungan Laku	Tabungan Cermat BSA	BNI Pandai
<b>Rencana Agen 2015</b>	50.000 Agen	9.060 Agen	39.465 Agen	3.000 Agen	12.544 Agen	3.000 Agen
<b>Realisasi Jumlah Agen per 31 Mei 2015</b>	791 Agen	525 Agen	1.235 Agen	6 Agen	2 Outlet Badan Hukum	29 Agen*
<b>*) BNI per 11 Juni 2015</b>						
<b>Total Jumlah Rekening BSA per 31 Mei 2015</b>	3.477 Nasabah	25 Nasabah	9.533 Nasabah	176 Nasabah	261 Nasabah	31 Nasabah*
<b>*) BNI per 11 Juni 2015</b>						
<b>Total Saldo BSA per 31 Mei 2015</b>	Rp1.131.262.295	Rp270.929	Rp242.415.661	Rp16.384.006	Rp6.924.000	Rp1.266.000*
<b>*) BNI per 11 Juni 2015</b>						

<b>Total Jumlah Rekening BSA</b>	<b>13.503 Nasabah</b>
<b>Total Saldo BSA</b>	<b>Rp1.398.522.891</b>



## Terkait Edukasi & Perlindungan Konsumen

### Penanganan Pengaduan OJK

- Memfasilitasi masyarakat yang memiliki permasalahan dengan LJK melalui fasilitas layanan konsumen (FCC).
- layanan pengaduan OJK akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi
- Apabila pengaduan merupakan sengketa, maka OJK memfasilitasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila pengaduan memiliki dugaan pelanggaran ditindaklanjuti dengan pembinaan.
- OJK melengkapi sistem layanan dengan fasilitas *Traceable* dan *Trackable*.
- Sistem *Traceable* memungkinkan PUJK mengetahui pengaduan yang disampaikan konsumen ke OJK. Sistem *Trackable* memungkinkan konsumen untuk mengetahui status penanganan pengaduan tersebut oleh OJK.

### Penanganan Investasi Bodong

- Melakukan edukasi bersama dengan industri kepada masyarakat
- Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi.
- Penutupan 20 situs tawaran investasi ilegal bersama dengan Kementerian Kominfo
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada beberapa media massa dan wartawan mengenai adanya investasi ilegal
- Fasilitas pengaduan masyarakat mengenai adanya dispute antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis

# Jawaban Pertanyaan

## Terkait pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan Jasa Debt Collector

### Pengawasan OJK terhadap LJK yang menggunakan Debt Collector

- OJK telah melakukan beberapa langkah terkait, antara lain menerbitkan pengaturan mengenai jasa penagihan (POJK No.29/POJK.05/2014 Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan) yang di dalamnya mengatur:
  - Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi.
  - Perjanjian Kerja Sama dengan jasa penagihan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis bermaterai;
  - Harus dilakukan dengan jasa penagihan yang berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang dan memiliki SDM yang mempunyai sertifikasi profesi;
  - Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan jasa penagihan;
  - Perusahaan pembiayaan harus melakukan evaluasi berkala atas kerjasama dengan jasa penagihan.

# Jawaban Pertanyaan Terkait MEA

## Langkah Strategis OJK dalam rangka persiapan MEA

### Perbankan

- Penguatan SDM Bank melalui program sertifikasi, untuk menghadapi MEA.
- Meningkatkan kontribusi kepada sektor ekonomi prioritas di Indonesia demi pembangunan berkelanjutan seperti : *capacity building* analisis pembiayaan sektor prioritas, membangun hubungan antar instansi terkait baik internasional maupun domestik untuk keuangan berkelanjutan.
- MoU dengan antar otoritas bank baik di tingkat ASEAN dan ASEAN+ (Jepang, Korea, dan China) untuk kebijakan pengembangan perbankan dalam menghadapi MEA, studi banding dan beberapa kerjasama kajian.
- Penguatan manajemen risiko perbankan Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Internasional seperti BASEL.
- Mengembangkan produk-produk Keuangan Syariah yang diharap menarik investor asing (dapat merupakan *bundling* produk perbankan syariah dengan produk IKNB Syariah dan Pasar Modal Syariah) sehingga dapat kompetitif di kawasan ASEAN.

### Pasar Modal

- Kajian tentang Analisis Potensi Perantara Pedagang Efek Indonesia Dalam Rangka Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
- Penyusunan penyempurnaan peraturan mengenai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI).

### IKNB

- Kajian mengenai Optimalisasi Kapasitas Reasuransi
- Kajian program 1000 aktuaris

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015

## Terkait Pegawai Penugasan Bank Indonesia

Bagaimana kebijakan terhadap pegawai penugasan yang akan kembali ke BI

- Saat ini jumlah pegawai penugasan Bank Indonesia di OJK adalah sebanyak 1,128 pegawai
- Telah dilakukan survey pertama (bulan Juni 2015) untuk melihat proporsi pegawai penugasan yang tetap bekerja di OJK dan yang akan kembali ke BI. Namun masih terdapat pegawai yang ragu-ragu untuk tetap di OJK mengingat status dan kedudukan OJK saat itu belum ada ketetapan dari MK
- Selain itu, terdapat beberapa isu mengenai kebijakan SDM seperti kesejahteraan kesehatan, masa pensiun dan utang piutang yang belum jelas.

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015 Terkait Pegawai Penugasan Bank Indonesia (lanjutan)

## Kebijakan yang akan dilakukan

- Melakukan survey kedua pada Oktober 2015 untuk mengetahui minat pegawai penugasan BI di OJK
- Melakukan sosialisasi dan komunikasi untuk memperjelas kebijakan OJK tentang kesejahteraan kesehatan, masa pensiun dan utang piutang dan kebijakan MSDM lainnya yang terkait
- Menyusun langkah antisipasi lainnya misalkan dengan memperpanjang waktu penugasan dan membuat Plan B dengan melakukan rekrutmen dari pelaku dan tenaga ahli dari IJK

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015

## Terkait Edukasi Keuangan di Taiwan dan Jepang

- Berdasarkan data BNP2TKI, pada tahun 2014 jumlah TKI sebanyak 429.872 org, dan yang berada di Taiwan dan Jepang masing-masing sebanyak 82.655 dan 2.428 orang. Nilai remitansi oleh TKI di Taiwan dan Jepang masing-masing sebesar Rp8,52 Triliun dan Rp1,95 Triliun.
- Pelaksanaan edukasi keuangan untuk TKI dilakukan bersama Pemerintah/BNP2TKI dan Bank. Kerjasama ini merupakan aliansi strategis OJK dg Kementerian/Badan/Lembaga Negara dari aspek materi edukasi keuangan maupun pembiayaan penyelenggaraan kegiatannya, serta sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang mensyaratkan adanya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program edukasi keuangan dapat menjangkau masyarakat luas (masif dan komprehensif).
- Materi yang disampaikan pengenalan produk, pengelolaan keuangan, kewirausahaan dan pencegahan tawaran investasi/penghimpunan dana tanpa izin.
- Edukasi keuangan diberikan pra keberangkatan dan pra kepulangan.

# Jawaban Pertanyaan FGD, 22 Agustus 2015 Terkait Edukasi Keuangan di Taiwan dan Jepang

Total Kebutuhan Dana Tambahan Departemen Logistik			
No	Non Aset	Dana yang tersedia saat ini	Kebutuhan Dana
1	Kebutuhan Pengadaan sewa gedung Kantor Daerah (administrasi dan operasional)	182.988.202.364	<u>152.396.309.866</u>
2	Pengganti Dana yang di alihkan untuk colocation	62.748.269.670	<u>17.088.963.344</u>
3	Langganan daya dan Jasa (telpon)	933.990.000	386.000.000
4	Rekonsiliasi aset	-	1.005.000.000
5	Pencetakan Kalender dan Agenda	-	1.200.000.000
Aset			
1	Kekurangan dana untuk Pengadaan Mobil dinas (operasional dan jabatan)	9.020.000.000	<u>9.480.000.000</u>
2	Kekurangan Pengadaan Sewa dan Pembelian Gedung Kantor Daerah (Pengadaan Aset)	101.787.313.817	<u>46.511.196.115</u>
<b>Jumlah</b>		<b>357.477.775.851</b>	<b>228.067.469.326</b>
		Pengembalian Sisa Anggaran dari Satker	57.516.029.450
		<b>Kebutuhan Dana</b>	<b>170.551.439.876</b>

# 7

# KESIMPULAN



# KESIMPULAN (USULAN PERSETUJUAN)

1. Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun 2016 sebesar Rp3.802,80 miliar dengan sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari Pungutan;
2. Penggunaan kelebihan target penerimaan pungutan tahun 2014 sebesar Rp183,96 miliar untuk digunakan pada tahun anggaran 2015.
3. Remunerasi pegawai Bank Indonesia yang dipekerjakan di OJK pada tahun anggaran 2016 tetap dibayarkan oleh Bank Indonesia dan penyetaraannya dibayarkan oleh OJK; serta
4. Penyediaan gedung kantor pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengoptimalkan peran OJK di pusat serta daerah

# Lampiran I : Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan Tahun 2014

dalam miliar rupiah

No.	Uraian	Jumlah Penerimaan
1	Realisasi Penerimaan tahun 2014 per tanggal 31 Desember 2014	2.020,28
2	Penerimaan OJK tahun 2014 yang dialokasikan untuk anggaran 2015	1.836,32
	Kelebihan Target Penerimaan Pungutan Tahun 2014	183,96

dalam miliar rupiah

No.	Program Kerja	Rencana Pelaksanaan	Jumlah Anggaran
1	Pengembangan Infrastruktur Gedung dan Pengadaan Sarana Pendukung Operasional	September - Desember 2015 (Setelah mendapatkan Ijin Komisi XI DPR-RI)	170,55
2	Kegiatan terkait dengan operasionalisasi OJK		13,41
Total			183,96

